

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025

Jl. Vatu Bala

Donggala - Sulawesi Tengah 94351

Telp. 0457-72252 Fax. 0457-72252

e-mail : donggala_pn@yahoo.co.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Vatu Bala
Telp. 0457-72252 Fax. 0457-72252
Donggala - Sulawesi Tengah 94351
e-mail : donggala_pn@yahoo.co.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Donggala adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Donggala. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Donggala, 23 Februari 2026

Ketua Pengguna Anggaran

Sekretaris



Murhadiyanto, S.T

NIP.197806282005021001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Donggala.....	12
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.3. Basis Akuntansi	13
A.4. Dasar Pengukuran.....	14
A.5. Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	21
B.2. Belanja.....	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	31
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	31
D.2. Beban Pegawai	32
D.3. Beban Persediaan	32
D.4. Beban Barang dan Jasa	33
D.5. Beban Pemeliharaan	33
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	34
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.8. Kegiatan Non Operasional	35
D.9. Pos Luar Biasa	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
E.1. Ekuitas Awal.....	36
E.2. Surplus (defisit) LO	36
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	43
E.4. Penyesuaian Nilai Aset	36
E.5. Koreksi Nilai Persediaan	36

E.6. Selisih Revaluasi Aset Tetap	37
E.7. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	37
E.8. Koreksi Lain-lain.....	37
E.9. Transaksi Antar Entitas	37
E.10. Ekuitas Akhir	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	40
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	40
F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	40
F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	40
F.2.3. Rekening Pemerintah	40
F.2.4. Revisi DIPA	40
F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB	41
F.2.6. Catatan Penting Lainnya	43
Laporan-laporan Pendukung.....	44
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	57
Rincian Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)	59
Daftar Hibah Langsung	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Donggala
Jl. Vatu Bala Kabupaten Donggala -
Telp. 0457-72252 Fax. 0457-72255 e-mail : donggala_pn@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala Semester II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Donggala, 23 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



Murhadiyanto, S.T

NIP. 197806282005021001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.152.136 atau mencapai 82 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 19.665.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 5.417.756.337 atau mencapai 99.5 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.447.590.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dan 2024 .

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 21.579.198.083, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 284.400; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 21.578.913.683; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.621.203.847 dan Rp. 19.957.994.236.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 16.152.136,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 7.797.389.393 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (7.781.237.257) Kegiatan Non Operasional dan Sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar (Rp. 7.781.237.257) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 7.781.237.257).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 22.234.757.292 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 7.781.237.257) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.504.474.201 dan ditambah (dikurangi) penurunan ekuitas sebesar (2.276.763.056) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 19.957.994.236.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah						
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	19.665.000	16.152.136	82	18.369.544
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			19.665.000	16.152.136	82	18.369.544
B. Belanja Negara						
1.	Belanja Pegawai	B.3.	4.003.263.000	3.947.293.488	99	3.327.955.589
2.	Belanja Barang	B.4.	1.142.327.000	1142187.849	99	1.220.831.618
3.	Belanja Modal	B.5.	302.000.000	301.275.000	100	0
Jumlah Belanja Negara			544.7590.000	5.417.756.337	99	4.548.787.207

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
NERACA PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bndahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C. 2.	0	0
Persediaan	C. 3.	284.400	392.000
Jumlah Aset Lancar		284.400	392.000
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	1.877.739.000	1.877.739.000
Peralatan dan Mesin	C. 5.	3.738.003.860	3.333.858.860
Gedung dan Bangunan	C. 6.	22.962.948.693	22.962.948.693
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	16.549.869	16.549.869
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 9.	(7.016.517.739)	(5.956.815.080)
Jumlah Aset Tetap		21.579.198.083	22.234.471.342
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 10.	0	4.890.000
Aset Lain-lain	C. 11.	463.471.393	463.471.393
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 12.	(468.361.393)	(468.361.393)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		21.579.198.083	22.234.863.342
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 13.	1.621.203.847	106.050
Uang Muka dari KPPN	C. 14.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.621.203.847	106.050
Jumlah Kewajiban		1.621.203.847	106.050
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15.	19.957.994.236	22.234.757.292
Jumlah Ekuitas		19.957.994.236	22.234.757.292
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		21.579.198.083	22.234.863.342

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	16.152.136	16.989.544
Jumlah Pendapatan		16.152.136	16.989.544
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	5.579.541.390	3.327.955.589
Beban Persediaan	D. 3	40.208.250	24.502.310
Beban Barang dan Jasa	D. 4	678.172.937	691.053.512
Beban Pemeliharaan	D. 5	413.854.625	434.977.326
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	25.909.532	70.040.531
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada masyarakat	D. 7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 8	1.059.702.659	1.029.677.328
Jumlah Beban		7.797.389.393	5.578.206.585
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(7.781.237.257)	(5.561.217.041)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 8	0	0
Pendapatan Dari Kegiatan Operasional Lainnya		0	1.380.000
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	1.380.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(7.781.237.257)	(5.559.837.041)
Pos Luar Biasa	D. 9	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(7.781.237.257)	(5.559.837.041)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	22.234.757.292	23.371.482.775
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(7.781.237.257)	(5.559.837.041)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	(107.316.105)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	5.504.474.201	4.531.417.663
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	(2.276.763.056)	(1.136.725.483)
Ekuitas Akhir	E. 6	19.957.994.236	22.234.757.292

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri DONGGALA

Pengadilan Negeri Donggala didirikan sebagai salah satu Lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan yang berkedudukan di Jalan Vatu Bala No. 4 Kabupaten Donggala.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Donggala tahun 2025-2029 merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Mahkamah Agung RI, yang lingkungannya dalam kurun 5 tahun telah berakhir pada tahun 2025, sehingga Pengadilan Negeri Donggala perlu melakukan revisi Rencana Strategis dengan membuat Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2025 sampai dengan 2029 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Donggala.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG” yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluruhan sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Donggala sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Negeri Donggala adalah “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA YANG AGUNG”, dimana di dalamnya dikelola oleh Hakim dan Pegawai yang memiliki kemuliaan dan keluruhan sikap dan jiwa serta sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

Misi Pengadilan Negeri Donggala adalah :

1. Menjaga Kemandirian Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Negeri Donggala melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Manajemen Pengadilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
4. Administrasi Umum
5. Kinerja Pelayanan Publik
6. Administrasi Keuangan
7. Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa
8. IT dan Informasi Publik
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan
10. Manajemen Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi
11. Administrasi Perkara Pengadilan Hubungan Industrial

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari SAKTI Modul GLP dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut:

(1.)Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.)Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2025. Berdasarkan pertimbangan Efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang

disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.)Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.)Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama Periode Berjalan, Pengadilan Negeri Donggala telah Mengadakan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dari DIPA Awal. Hal Ini Disebabkan oleh adanya optimalisasi penyerapan anggaran untuk meningkatkan pencapaian program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Pengurangan Pagu Belanja Kesehatan Hakim Adhoc Tipikor, serta Revisi Penambahan Pagu Belanja Langganan Daya dan Jasa berupa Langganan Internet, Listrik dan Belanja Sewa Rumah Hakim Adhoc yang dilakukan oleh Badan Urusan Administrasi MARI. Serta Revisi Pagu Minus terkait Pembayaran Gaji/Tunjangan yang melekat pada Gaji yang harus diselesaikan melalui mekanisme Revisi DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
	Pendapatan		
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp -	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp 19.665.000	Rp -
	Jumlah Pendapatan	Rp 19.665.000	Rp -
	Belanja		
51	Belanja Pegawai	Rp 3.465.011.000	Rp 4.003.263.000
52	Belanja Barang	Rp 1.222.190.000	Rp 1.142.327.000
53	Belanja Modal	Rp 302.000.000	Rp 302.000.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah : Rp.
16.152.136

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 16.152.136 atau mencapai 82 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 19.665.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Donggala adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA. 2025

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.665.000	16.152.136	82
2.	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
	Total Pendapatan	19.665.000	16.152.136	82

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.294.616) dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena :

1. Pada tahun 2025 pendapatan negara bukan pajak bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yakni pendapatan sewa rumah dinas dan pada tahun 2025 mengalami penurunan penerimaan pnbp di karenakan pada tahun 2025 terjadi kekosongan pada jabatan wakil ketua sehingga rumah dinas wakil tidak berpenghuni.
2. Terjadi mutasi hakim pada bulan juli sehingga terjadi kekosongan beberapa rumah dinas dan berganti ke pada hakim yang baru di lantik.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Perbandingan Realisasi PNBPA per 31 Desember TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.152.136	18.369.544	(2.217.408)	(6,4)
2.	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0,00
3.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		16.152.136	18.369.544	(2.217.408)	(6,4)

Rincian Pendapatan berupa Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

	Nama Pegawai	Surat Izin Penempatan	Jumlah
1	Niko Hnedra Saragi, S.H	Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 46/SEK.PN.W21-U5/SK.RT1/VI/2025	Rp. 270.270
2	Annas Banu Aji, S.H	Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 119/SEK.PN.W21-U5/SK.RT1/VI/2025	Rp. 208.494
4	Rizki Sagoro, S.H	Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 120/SEK.PN.W21-U5/SK.RT1/VI/2025	Rp. 208.494
5	Miranti Putri Pratiwi, S.H	Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 51/SEK.PN.W21-U5/SK.RT1/VI/2025	Rp. 208.494
6	Nurhadiyanto, S.T	Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 50/SEK.PN.W21-U5/SK.RT1/VI/2025	Rp. 208.494
7	Ronaldo Situmorang, S.H	Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 94/SEK.PN.W21-U5/SK.RT1/VI/2025	Rp. 208.494
			Rp. 1.316.740

Berkurangnya pendapatan sewa rumah dinas pada T.A 2025 di bandingkan dengan T.A 2025 dikarenakan 2 (dua) unit rumah dinas yang tidak ditempati yakni rumah dinas wakil ketua dan hakim

Rincian Persekot Gaji dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Persekot Gaji
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama Pegawai	Jumlah	Cicilan/Bulan	TMT
1	-	-	-	-
Jumlah				

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp.
5.417.756.337

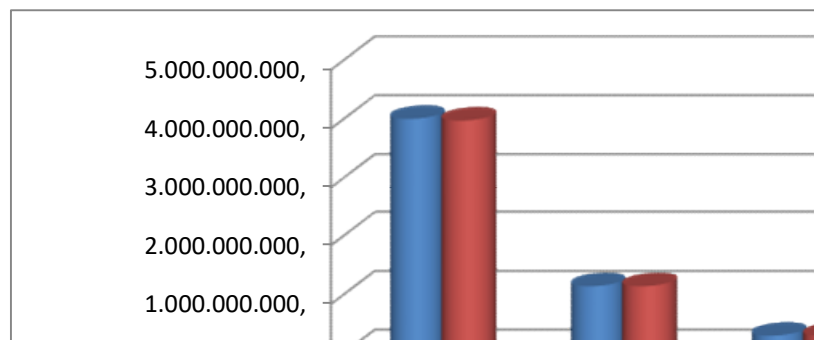
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Donggala per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 5.417.756.337 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99 % dari anggaran senilai Rp. 5.447.590.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada periode 31 Desember TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.003.263.000	3.974.293.488	99
Belanja Barang	1.142.327.000	1.142.187.849	99
Belanja Modal	302.000.000	301.275.000	100
Total Belanja Bruto	5.447.590.000	5.417.756.337	99
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	5.447.590.000	5.417.756.337	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Tahun 2025

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 868.969.130 atau sebesar 8.7 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Hal tersebut disebabkan

antara lain:

1. Adanya kenaikan gaji hakimi dan penambahan jumlah hakim pada tahun 2025.
2. Adanya belanja modal berupa peralatan dan mesin sehingga menabahnya realisasi anggaran belanja tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.974.293.488	3.327.955.589	646.337.899	8.8
Belanja Barang	1.142.187.849	1.220.831.618	(78.643.769)	(3.3)
Belanja Modal	301.275.000	0	301.275.000	100
Total Belanja	5.417.756.337	4.548.787.207	868.969.130	8.7

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp.
3.974.293.488

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Donggala per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 3.974.293.488 dan Rp. 3.327.955.589. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 646.337.899 atau 8.8 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain karena kosongnya jabatan wakil sehingga mengakibatkan penurunan realisasi belanja pegawai pada T.A 2025. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.306.804.220	1.316.851.840	-10.047.620	-0.38
Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.739	18.043	5.696	13.6
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59.321.310	70.864.080	-11.542.770	-8.8
Belanja Tunj. Anak PNS	20.066.424	22.851.138	-2.784.714	-6.4
Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	53.240.000	1.328.700.000	-1.275.460.000	-92.2
Belanja Tunj. PPh PNS	4.531.335	156.763.784	-152.232.449	-94.3
Belanja Tunj. Beras PNS	60.181.020	65.322.840	-5.141.820	-4
Belanja Uang Makan PNS	235.682.000	208.070.000	27.612.000	6.2
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.505.000	10.960.000	2.545.000	0.1
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	149.850.000	129.600.000	20.250.000	7.2
Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	200.614.648	0	200.614.648	100
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.698.160.000	0	1.698.160.000	100
Belanja Gaji Pokok PPPK	101.487.600	0	101.487.600	100
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.144	0	2.144	100
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.295.240	0	4.295.240	100
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.260.888	0	1.260.888	100

Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.503.920	0	5.503.920	100
Belanja Uang Makan PPPK	26.544.000	0	26.544.000	100
Belanja Tunjangan Umum PPPK	6.560.000	0	6.560.000	100
Total Belanja Brutto	3.975.773.488	3.328.141.725	647.631.763	8.8
Pengembalian Belanja	1.480.000	186.136	1.293.864	77
Total Belanja Netto	3.974.293.488	3.327.955.589	646.337.899	8.8

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp.
1.142.187.849

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Donggala per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 1.142.187.849 dan Rp. 1.220.831.618.

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.621.731 atau 0.7 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggagran untuk belnaja barang sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahu 2025.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	999.500	8.965.000	-7.965.500	-79
Belanja Barang Persediaan	61.515.990	75.718.000	-14.202.010	-10.3
Belanja Barang Dan Jasa	47.840.568	18.203.800	29.636.768	44.8
Belanja Pemeliharaan	392.439.285	418.596.326	-26.157.041	-3.2
Belanja Perjalanan Dinas	25.909.532	70.040.531	-44.130.999	-45
Belanja Barang Operasional	613.482.974	664.084.662	-50.601.688	-3.9
Total Belanja Brutto	1.142.187.849	1.220.831.618	-78.643.769	-3.3
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.142.187.849	1.220.831.618	-78.643.769	-3.3

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal: Rp
301.275.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Donggala per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 30.1275.000 dan Rp. 0. Pada tahun 2025 dan 2024 Pengadilan Negeri Donggala tidak memiliki belnaja modal baik berupa gedung maupun perlatan dan mesin.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal	301.275.000	0	301.275.000	100
Total Belanja Brutto	301.275.000	0	301.275.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	301.275.000	0	301.275.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Hosting dan Domain Website	0	0
Jumlah		0	0

C.2 Tanah

*Tanah:
Rp.
1.877.739.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.877.739.000 dan Rp. 1.877.739.000.

Rincian saldo Tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	2.01.01.04.001.1	7.831	2	Pemerintah RI cq MA-RI	Gedung	1.586.709.000
2	2.01.01.01.005.1	1.604	1	Pemerintah RI cq MA-RI	Kantor Setling Plats	291.031.000
Jumlah						1.877.739.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	1.877.739.000
Mutasi Tambah	
-	0
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	1.877.739.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	1.877.739.000

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Kurang terhadap Aset Tetap berupa Tanah pada periode

Laporan Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Donggala.

C.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp.
3.738.003.860

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.333.858.860 dan Rp. 3.333.858.860. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	3.333.858.860
Mutasi Tambah	
- Pembelian	301.275.000
- Reklasifikasi Keluar	-227.025.000
- Reklasifikasi Masuk	227.025.000
- Transfer Masuk	102.870.000
Mutasi Kurang	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2025	3.738.003.860
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(3.168.218.073)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	569.785.787

- Mutasi Tambah :

- ❖ Realisasi Belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 404.145.000,-. Penambahan tersebut merupakan transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan pembelian yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025.

C.1 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan: Rp.
22.962.948.693

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 22.962.948.693 dan Rp. 22.962.948.693.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	22.962.948.693
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	(19.486.114.693)
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi Keluar	19.486.114.693
Saldo per 31 Desember 2025	22.962.948.693
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(3.848.299.666)
Nilai Buku 31 Desember 2025	19.114.649.027

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2 Jaringan

Aset Jaringan
: Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp
16.739.869

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 16.739.869 dan Rp. 16.739.869

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	16.739.869
Mutasi Tambah	
-	0
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	16.739.869
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	16.739.869

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Kurang terhadap Aset Tetap Lainnya pada periode Laporan Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Donggala.

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap:
(Rp.
7.016.517.739)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp. 7.016.517.739) dan (Rp. 5.956.815.080)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.738.003.860	(3.168.218.073)	569.785.787
2	Gedung dan Bangunan	22.962.948.693	(3.848.299.666)	19.114.649.027
3	Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	16.739.869	0	16.739.869
	Jumlah	26.313.547.422	(7.016.517.739)	19.701.174.683

C.5 Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp.463.471.393*

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 463.471.393 dan Rp. 463.471.393. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Donggala serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2025	463.471.393
Mutasi Tambah	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi Kurang	
- Penghapusan dari BMN	0
Saldo per 31 Desember 2025	463.471.393
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	463.471.393

C.6 Akumulasi Aset Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Aset
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp.468.361.393)
3)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2025 adalah masing-masing (Rp.468.361.393) dan (Rp. 461.838.643). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	51.850.000	51.850.000	0
2	Alat Kantor	115.828.568	115.828.568	0
3	Alat Rumah Tangga	74.478.600	74.478.600	0
4	Alat Studio	5.203.000	5.203.000	0
5	Alat Komunikasi	19.700.000	19.700.000	0
6	Komputer Unit	159.609.500	159.609.500	0
7	Peralatan Komputer	36.801.725	36.801.725	0
Jumlah		463.471.393	463.471.393	0

C.7 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp.
1.621.203.847

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.621.203.847 dan Rp. 106.050. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	108.600	Merupakan Tagihan PDAM Bulan Desember 2025
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	15.761.345	Merupakan Tagihan Listrik Bulan Desember 2025
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga	86.000	Merupakan Tagihan Telpon Bulan Desember 2025
4.	Utang Kepada Pihak Ketiga	353.047.902	Merupakan Pembayaran Tunjangan PPH Pejabat Negara Bulan Oktober s.d Desember 2025
5.	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.252.200.000	Merupakan Pembayaran Tunjangan Fungsional Pejabat Negara Bulan Oktober s.d Desember 2025
Jumlah		1.621.203.847	

C.8 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
diterima
dimuka:
Rp.0*

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Rincian Pendapatan diterima dimuka (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	-	0	
	Jumlah	0	

C.9 Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.
22.234.757.292*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.234.757.292 dan Rp. 23.371.482.775. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
16.152.136*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 16.152.136 dan Rp. 16.989.544. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.665.000	16.152.136	82
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0,00
3.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan	19.665.000	16.152.136	82

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp. 5.579.541.390

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.579.541.390 dan Rp. 3.327.955.589. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.306.804.220	1.316.851.840	-10.047.620	-0.38
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.739	18.043	5.696	13.6
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59.321.310	70.864.080	-11.542.770	-8.8
Beban Tunj. Anak PNS	20.066.424	22.851.138	-2.784.714	-6.4
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	53.240.000	1.328.700.000	-1.275.460.000	-92.2
Beban Tunj. PPh PNS	4.531.335	156.763.784	-152.232.449	-94.3
Beban Tunj. Beras PNS	60.181.020	65.322.840	-5.141.820	-4
Beban Uang Makan PNS	235.682.000	208.070.000	27.612.000	6.2
Beban Tunjangan Umum PNS	13.505.000	10.960.000	2.545.000	0.1
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(1.480.000)	0	(1.480.000)	100
Umum PNS				
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	149.850.000	129.600.000	20.250.000	7.2
Beban Tunjangan PPh Pejabat Negara	553.662.550	0	200.614.648	100
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.950.360.000	0	1.6981.60.000	100
Negara				
Beban Gaji Pokok PPPK	101.487.600	0	101.487.600	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.144	0	2.144	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.295.240	0	4.295.240	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.260.888	0	1.260.888	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	5.503.920	0	5.503.920	100
Beban Uang Makan PPPK	26.544.000	0	26.544.000	100
Beban Tunjangan Umum PPPK	6.560.000	0	6.560.000	100
Total Beban Brutto	5.581.021.390	3.328.141.725	2.252.879.665	25
Pengembalian Belanja	1.480.000	186.136	1.293.864	77
Total Beban Netto	5.579.541.390	3.327.955.589	2.251.585.801	25

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp. 40.208.250

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 40.208.250 dan Rp. 24.502.300. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	40.208.250	24.502.300	15.705.950	24
Total Beban Persediaan	40.208.250	24.502.300	15.705.950	24

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa : Rp.
678.172.937

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 678.172.937 dan Rp. 691.053.512. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	540.042.924	587.824.452	-47.781.528	-4.2
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.101.550	5.145.710	7.955.840	48
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56.406.000	48.432.000	7.974.000	7
Beban Barang Operasional Lainnya	3.932.500	22.456.500	-18.524.000	-70
Beban Bahan	299.500	0	299.500	100
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	8.965.000	-8.965.000	-100
Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	700.000	0	700.000	100
Beban Langganan Listrik	15.761.345	0	15.761.345	100
Beban Langganan Telepon	1.031.950	1.029.800	2.150	0.1
Beban Langganan Air	855.100	2.140.050	-1.284.950	-42
Beban Sewa	43.042.068	14.460.000	28.582.068	49
Beban Jasa lainnya	3.000.000	600.000	24.00.000	66
Total Beban Barang dan Jasa	678.172.937	691.053.512	-12.880.575	-0.9

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp. 413.854.625

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 413.854.625 dan Rp. 434.977.326. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.300.605	137.090.000	5.210.605	1.8
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	34.689.510	52.495.500	-17.805.990	-20
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	215.449.170	229.010.826	-13.561.656	-3
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21.415.340	16.381.000	5.034.340	13
Total Beban Pemeliharaan	413.854.625	434.977.326	-21.122.701	-2

D.6. Beban Perjalanan Dinas.

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
25.909.532

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.909.532 dan Rp. 70.040.530. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	25.909.532	70.040.530	-44.130.998	-45
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	25.909.532	70.040.530	-44.130.998	-45

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
1.059.702.659

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.059.702.659 dan Rp. 1.029.677.328. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	348.489.269	318.463.938	30.022.331	4.5
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	711.213.390	711.213.390	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.059.702.659	1.029.677.328	30.022.331	4.5

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus
Kegiatan Non
Operasional:
Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1.380.000	-1.380.000	-100
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	1.380.000	-100

D.9. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.
22.234.757.292 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.234.757.292 dan Rp. 23.371.482.775

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(Defisit)
LO:(Rp.
7.781.237.257) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp. 7.781.237.257) dan (Rp. 5.559.837.041). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan (Rp. 107.306.105). Koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas adalah koreksi kesalahan mendasar dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset Rp. 0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.5. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi *Nilai*
Persediaan Rp.
0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.6. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp. 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari Penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

E.7. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp. 0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan (Rp. 107.306.105). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.8. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-
lain Rp. 0

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Jumlah	0

E.9. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar
Entitas Rp.
5.504.474.201

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.504.474.201 dan Rp. 4.530.417.663.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.417.756.337
Diterima dari Entitas Lain	-16.152.136
Transfer Masuk	102.870.000
Transfer Keluar	0
Jumlah	5.504.474.201

E.9.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari
Entitas Lain
(DDEL) (Rp.
16.152.136)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp. 16.152.136) sedangkan DKEL sebesar Rp. 5.417.756.337

Ditagihkan ke
Entitas Lainnya
(DKEL) Rp.
5.417.756.337

E.9.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp. 102.870.000

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar
(Rp.0)

Rincian transfer masuk dan keluar adalah sebagai berikut :

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

No	Satuan Kerja	Transfer Masuk	Transfer Keluar
1	BUA Mahkamah Agung	102.870.000	0
Jumlah	BUA Mahkamah Agung	102.870.000	0

E.9.3. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung, dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan
Hibah
Langsung Rp. 0

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung pada TA 2025 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung pada TA 2025 adalah Rp(0)

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan pengesahan hibah langsung KL dalam bentuk barang maupun jasa yang perolehannya pada tahun sebelumnya. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada TA 2025 sebesar Rp.0. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Pengesahan
Pengembalian
Hibah
Langsung Rp. 0

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Pengesahan
Hibah
Langsung TAYL
Rp.0

No	Satuan Kerja	Bentuk Hibah	Pengesahan Hibah	Pengembalian Hibah	Pengesahan Hibah TAYL
-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-

E.10. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah
Rp masing-masing sebesar Rp. 19.957.994.236 dan Rp. 22.234.757.292.
19.957.994.236

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pengadilan Negeri Donggala tidak mengalami kejadian penting setelah tanggal neraca yang mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada Stakeholder dan dalam penyusunan Laporan Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

F.2. Pengungkapan Lain- Lain

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap Laporan Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual Terhadap Laporan Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan untuk mengelola Dana APBN Satker Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC DONGGALA A/C 653254772025000 a.n. BPG 051 PENGADILAN NEGERI DONGGALA yang digunakan untuk menampung Belanja DIPA BUA oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00

F.2.4. Revisi DIPA

Terdapat Revisi Dipa pada semester II Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan Pengadilan Negeri Donggala yakni :

1. Perubahan Revisi pada tanggal 10 Juli 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 berupa ABT penambahan anggaran pada akun 51 (belanja pegawai)

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
51	Belanja Pegawai	3.465.011.000	3.812.790.000

2. Perubahan Revisi pada tanggal 9 November 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 berupa Penuktahiran POK atas Revisi POK PPh Pejabat Negara (511324)

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
51	Belanja Pegawai	3.465.011.000	3.812.790.000

3.

3. Perubahan Revisi pada tanggal 24 November 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 berupa Penambahan Anggaran Belanja Pegawai (51)

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
51	Belanja Pegawai	3.812.790.000	3.927.550.000

4. Perubahan Revisi pada tanggal 7 Oktober 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 berupa Revisi Halaman III DIPA yaitu penyesuaian RPD dengan realisasi Triwulan III.
5. Perubahan Revisi pada tanggal 10 Oktober 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 berupa Revisi buka blokir anggaran perjalanan dinas yang dilakukan penarikan anggaran oleh eselon I
6. Perubahan Revisi pada tanggal 30 Oktober 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 Revisi Pagu Minus.

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.145.739.000	1.145.739.000
51111	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	90,000,000	83,474,000
51111	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	90,000,000	82,787,000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51,460,000	50,991,000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	5,230,000	4,205,000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	5,230,000	4,181,000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,723,000	1,468,000
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,723,000	1,451,000
	Belanja Tunj. Anak PNS	20,676,000	17,181,000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	135,280,000	42,830,000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	4,090,000	3,790,000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	4,090,000	3,790,000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	14,196,000	27,000
511126	Belanja Tunj Beras PNS	70,000,000	60,295,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	248,010,000	236,330,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,980,000	12,045,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	148,500,000	149,850,000
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	176,030,000	165,130,000
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,553,090,000	1,524,190,000

511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,000	101,516,000
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,000	5,422,000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,000	1,263,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,000	5,504,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,000	6,560,000

7. Perubahan Revisi pada tanggal 26 November 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 Revisi Pagu Minus.

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.145.739.000	1,142,375,000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42,830,000	46,030,000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	27,000	190,000
511619	Pembulatan	2.000	3.000

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada Semester II Tahun Anggaran 2025 terdapat ralat SPM berupa ralat akun Sewa Rumah Dinas dan Akun PPh Pejabat Negara dan Akun Tunjangan Fungsional Pejabat Negara.

Tanggal Ralat	No dan Tgl SPM	No dan Tgl SP2D	Akun Sebelum Ralat	Akun Sesudah Ralat
9 Juli 2025	00001T Tanggal 1 Januari 2025	250511502000039 Tanggal 1 Januari 2025	425131	425151
9 Juli 2025	00005T Tanggal 7 Januari 2025	250511301000026 Tanggal 8 Januari 2025	425131	425151
9 Juli 2025	00009T Tanggal 14 Januari 2025	250511501000336 Tanggal 1 Februari 2025	425131	425151
9 Juli 2025	00018T Tanggal 20 Januari 2025	250511502000185 Tanggal 1 Februari 2025	425131	425151
9 Juli 2025	00017T Tanggal 20 Januari 2025	250511501000335 Tanggal 1 Februari 2025	425131	425151
9 Juli 2025	00029T Tanggal 14 Februari 2025	250511502000298 Tanggal 1 Maret 2025	425131	425151
9 Juli 2025	00028T Tanggal 14 Februari 2025	250511501000458 Tanggal 1 Maret 2025	425131	425151
9 Juli 2025	00033T Tanggal 14 Februari 2025	250511501000426 Tanggal 1 Maret 2025	425131	425151
10 Juli 2025	00046T Tanggal 12 Maret 2025	250511501001078 Tanggal 1 April 2025	425131	425151
10 Juli 2025	00047T Tanggal 12 Maret 2025	250511502000529 Tanggal 1 April 2025	425131	425151
10 Juli 2025	00049T Tanggal 12 Maret 2025	250511501001079 Tanggal 1 April 2025	425131	425151
10 Juli 2025	00067T Tanggal 15 April 2025	250511501001554 Tanggal 1 Mei 2025	425131	425151

10 Juli 2025	00070T Tanggal 15 April 2025	250511501001555 Tanggal 1 Mei 2025	425131	425151
10 Juli 2025	00068T Tanggal 15 April 2025	250511502000633 Tanggal 1 Mei 2025	425131	425151
24 November 2025	00001T Tanggal 1 Januari 2025	250511502000039 Tanggal 1 Januari 2025	511124 dan 511125	511339 dan 511324
24 November 2025	00005T Tanggal 7 Januari 2025	250511301000026 Tanggal 8 Januari 2025	511124 dan 511125	511339 dan 511324
24 November 2025	00002T Tanggal 1 Januari 2025	250511506000066 Tanggal 1 Januari 2025	511124 dan 511125	511339 dan 511324

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan diikuti oleh surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala No. 81/SEK.PN.W21-U5/KU1.1.1/I/2025 Tanggal 05 Januari 2025 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima/Bendahara PNBP, serta Staf pengelola Keuangan DIPA 477202 di lingkungan Pengadilan Negeri Donggala TA 2025, serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 83/SEK.PN.W21-U5/KU1.1.1/I/2025 Tanggal 05 Januari 2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DIPA 477202 di Lingkungan Pengadilan Negeri Donggala TA 2025 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana berikut ini:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nurhadiyanto, S.T	KPA
2.	Rahmah, S.Kom	PPK
3.	Muntari Tri Ristijayanti, S.E	PPSPM
4.	Ryan Rudini, A.Md	Bendahara

LAPORAN PENDUKUNG

**PENYAJIAN DATA ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI
RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN
2025 PADA LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DONGGALA SEMESTER II TAHUN 2025**

A. Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Lampiran Laporan Keuangan Output Semester II Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Semester II Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Donggala antara lain sebagai berikut

**INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI DONGGALA
SEMESTER II TAHUN 2025**

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Donggala
Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : (04) Peradilan

Kode	Uraian	Belanja			Keluaran				GAP	Referensi	Ket
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progres Capaian			
03	Ketertiban dan Keamaban	5.447.890.000	5.419.236.337	99.48							
04	Peradilan	5.447.890.000	5.419.236.337	99.48							
WA	Program Dukungan Manajemen	5.447.890.000	5.419.236.337	99.48							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	302.000.000	301.275.000	99.76							
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	302.000.000	301.275.000	99.76							

951	Layanan Sarana Internal	302.000.000	301.275.000	99.76	21	Unit	21	100%	0.24 %	(00)	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.145.590.000	5.117.961.337	99.46							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.145.290.000	5.117.661.837	99.46							
962	Layanan Umum	700.000	700.000	100	1	Laporan	1.00	100	0	(00)	
994	Layanan Perkantoran	5.144.590.000	5.116.961.837	99.46	1	Layanan	0.00	74.97%	3.77 %	(00)	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	299.500	99.83							
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	299.500	99.83	1	Dokumen	1.00	100	0.17	(00)	

B. Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat disajikan dalam lampiran LKKL. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Pengadilan Negeri Donggala tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) khususnya pada DIPA Badan Urusan Administrasi:

Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Satuan	Target	Capaian	%
-	-	-	-	-	-	-	-

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		9.435,	1.877.739.000,	0,	0,	0,	1.877.739.000,
2010101	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	-	1.604,	291.030.000,	0,	0,	0,	291.030.000,
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	7.831,	1.586.709.000,	0,	0,	0,	1.586.709.000,
132111	Peralatan dan Mesin		412,	3.738.003.860,	(2.819.728.804,)	(348.489.269,)	(3.168.218.073,)	569.785.787,
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	-	1,	178.200.000,	0,	(25.457.142,)	(25.457.142,)	152.742.858,
3010305	POMPA	-	1,	10.450.000,	(10.450.000,)	0,	(10.450.000,)	0,
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	3,	856.528.117,	(602.130.359,)	(102.030.021,)	(704.160.380,)	152.367.737,
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	2,	16.891.000,	(16.891.000,)	0,	(16.891.000,)	0,
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	36,	122.888.428,	(121.313.428,)	(1.575.000,)	(122.888.428,)	0,
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	15,	167.906.500,	(140.596.200,)	(25.352.300,)	(165.948.500,)	1.958.000,
3050201	MEUBELAIR	-	165,	572.013.000,	(489.353.000,)	(23.260.000,)	(512.613.000,)	59.400.000,
3050204	ALAT PENDINGIN	-	23,	296.190.000,	(222.520.200,)	(34.609.800,)	(257.130.000,)	39.060.000,
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	12,	102.548.929,	(77.743.119,)	(11.638.324,)	(89.381.443,)	13.167.486,
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	12,	63.344.020,	(52.225.010,)	(5.863.604,)	(58.088.614,)	5.255.406,
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	4,	45.463.800,	(25.521.900,)	(9.092.760,)	(34.614.660,)	10.849.140,
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	1,	3.650.000,	(3.650.000,)	0,	(3.650.000,)	0,
3060207	ALAT-ALAT SANDI	-	4,	11.200.000,	(10.080.000,)	(1.120.000,)	(11.200.000,)	0,
3060347	SUMBER TENAGA	-	1,	89.500.000,	(89.500.000,)	0,	(89.500.000,)	0,
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1,	2.432.000,	(2.432.000,)	0,	(2.432.000,)	0,
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	1,	17.840.000,	(17.840.000,)	0,	(17.840.000,)	0,
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	67,	871.681.810,	(647.554.455,)	(95.541.070,)	(743.095.525,)	128.586.285,
3100201	PERALATAN MAINFRAME	-	5,	11.500.000,	(8.625.000,)	(2.875.000,)	(11.500.000,)	0,
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	30,	135.344.666,	(118.871.543,)	(10.074.248,)	(128.945.791,)	6.398.875,
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	8,	162.431.590,	(162.431.590,)	0,	(162.431.590,)	0,
133111	Gedung dan Bangunan		14,	22.962.948.693,	(3.137.086.276,)	(711.213.390,)	(3.848.299.666,)	19.114.649.027,
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	1,	671.482.000,	(2.645.904.366,)	2.355.331.056,	(290.573.310,)	380.908.690,
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	1,	150.000.000,	(19.642.103,)	(3.031.579,)	(22.673.682,)	127.326.318,
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	-	1,	19.486.114.693,	0,	(2.993.165.531,)	(2.993.165.531,)	16.492.949.162,
4010132	BANGUNAN FASILITAS UMUM	-	2,	531.704.000,	(92.722.904,)	(12.724.090,)	(105.446.994,)	426.257.006,
4010201	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	-	3,	786.402.000,	(137.941.571,)	(20.644.348,)	(158.585.919,)	627.816.081,
4010202	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	-	5,	1.024.706.000,	(190.890.001,)	(29.256.702,)	(220.146.703,)	804.559.297,
4040104	PAGAR	-	1,	312.540.000,	(49.985.331,)	(7.722.196,)	(57.707.527,)	254.832.473,
135121	Aset Tetap Lainnya		31,	16.739.869,	0,	0,	0,	16.739.869,
6010101	BUKU	-	29,	9.739.869,	0,	0,	0,	9.739.869,
6010301	BAHAN KARTOGRAFI	-	2,	7.000.000,	0,	0,	0,	7.000.000,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		97,	463.471.393,	(463.471.393,)	0,	(463.471.393,)	0,
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	3,	51.850.000,	(51.850.000,)	0,	(51.850.000,)	0,
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGAANDAN)	-	1,	79.650.000,	(79.650.000,)	0,	(79.650.000,)	0,
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	14,	34.178.568,	(34.178.568,)	0,	(34.178.568,)	0,
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	2,	2.000.000,	(2.000.000,)	0,	(2.000.000,)	0,
3050201	MEUBELAIR	-	35,	42.506.000,	(42.506.000,)	0,	(42.506.000,)	0,
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	1,	6.682.500,	(6.682.500,)	0,	(6.682.500,)	0,
3050204	ALAT PENDINGIN	-	3,	22.643.500,	(22.643.500,)	0,	(22.643.500,)	0,
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	5,	2.646.600,	(2.646.600,)	0,	(2.646.600,)	0,
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	7,	5.203.000,	(5.203.000,)	0,	(5.203.000,)	0,
3060207	ALAT-ALAT SANDI	-	1,	19.700.000,	(19.700.000,)	0,	(19.700.000,)	0,
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	13,	159.609.500,	(159.609.500,)	0,	(159.609.500,)	0,
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	12,	36.801.725,	(36.801.725,)	0,	(36.801.725,)	0,
JUMLAH			9.989,	29.058.902.815,	(6.420.286.473,)	(1.059.702.659,)	(7.479.989.132,)	21.578.913.683,

B. RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN (KDP)

Pengadilan Negeri DONGGALA
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

No	KDP	Satker	No. Kontrak	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP	Sumber Dana
-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-

C. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Negeri DONGGALA
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**




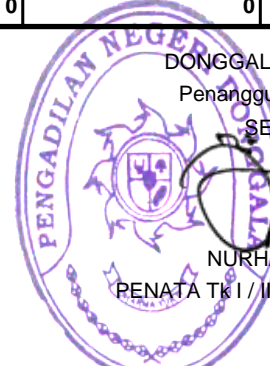
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI DONGGALA 477202

Tgl Data : 23/02/26 8:10 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 11:37 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,447,590,000	5,417,756,337	(29,833,663)	99.45	4,571,603,000	4,548,787,207	(22,815,793)	99.5
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

DONGGALA, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

NURHADIYANTO, ST
PENATA Tk I / IId 197806282005021001



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477202) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 23/02/26 8:10 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 11:37 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,152,136	16,989,544	(837,408)	(4.929)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,152,136	16,989,544	(837,408)	(4.929)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	16,152,136	16,989,544	(837,408)	(4.929)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,579,541,390	3,327,955,589	2,251,585,801	67.657
Beban Persediaan	40,208,250	24,502,300	15,705,950	64.1
Beban Barang dan Jasa	678,172,937	691,053,512	(12,880,575)	(1.864)
Beban Pemeliharaan	413,854,625	434,977,326	(21,122,701)	(4.856)
Beban Perjalanan Dinas	25,909,532	70,040,530	(44,130,998)	(63.008)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477202) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 23/02/26 8:10 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 11:37 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,059,702,659	1,029,677,328	30,025,331	2.916
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,797,389,393	5,578,206,585	2,219,182,808	39.783
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,781,237,257)	(5,561,217,041)	(2,220,020,216)	39.92
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,380,000	(1,380,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,380,000	(1,380,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	1,380,000	(1,380,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,781,237,257)	(5,559,837,041)	(2,221,400,216)	39.954
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,781,237,257)	(5,559,837,041)	(2,221,400,216)	39.954

Keterangan :

FINAL

DONGGALA, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



NUPHADIYANTO, ST

PENATA Tk I / IIIId 197806282005021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477202) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 11:37 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	22,234,757,292	23,371,482,775	(1,136,725,483)	(4.86)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,781,237,257)	(5,559,837,041)	(2,221,400,216)	39.95
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(107,306,105)	107,306,105	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(107,306,105)	107,306,105	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,504,474,201	4,530,417,663	974,056,538	21.5
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,276,763,056)	(1,136,725,483)	(1,140,037,573)	100.29
EKUITAS AKHIR	19,957,994,236	22,234,757,292	(2,276,763,056)	(10.24)

Keterangan :

FINAL

DONGGALA, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

NURHADIYANTO, ST

PENATA Tk I / IId 197806282005021001



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (477202) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 23/02/26 8:10 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 11:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	284,400	0
0.0	131111	Tanah	1,877,739,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,738,003,860	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	22,962,948,693	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	16,739,869	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,168,218,073
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,848,299,666
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	463,471,393	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	463,471,393
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,605,247,902
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	15,955,945
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,417,756,337
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,152,136	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	102,870,000
0.0	391111	Ekuitas	0	22,234,757,292
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	16,152,136
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,306,804,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23,739	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59,321,310	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	20,066,424	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	28,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	53,240,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,531,335	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	60,181,020	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	235,682,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,025,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	149,850,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	553,662,550	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,950,360,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	101,487,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,144	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,295,240	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,260,888	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,503,920	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	26,544,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	6,560,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	540,042,924	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,101,550	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (477202) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 23/02/26 8:10 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 11:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,406,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,932,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	299,500	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	15,761,345	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,031,950	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	855,100	0
3.0	522141	Beban Sewa	43,042,068	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142,300,605	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	34,689,510	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	215,449,170	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	25,909,532	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	348,489,269	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	711,213,390	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	40,208,250	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21,415,340	0
JUMLAH			36,872,728,744	36,872,728,744

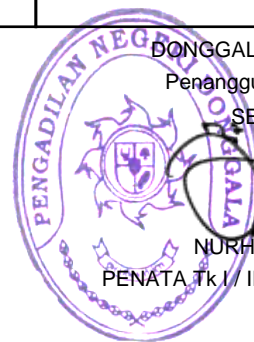
Keterangan :

FINAL

DONGGALA, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



NURHADIYANTO, ST

PENATA Tk I / IId 197806282005021001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477202) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 23/02/26 8:10 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 11:37 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	284,400	392,000	(107,600)	(27.45)
JUMLAH ASET LANCAR	284,400	392,000	(107,600)	(27.45)
ASET TETAP				
Tanah	1,877,739,000	1,877,739,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,738,003,860	3,333,858,860	404,145,000	12.12
Gedung dan Bangunan	22,962,948,693	22,962,948,693	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	16,739,869	16,739,869	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,016,517,739)	(5,956,815,080)	(1,059,702,659)	17.79
JUMLAH ASET TETAP	21,578,913,683	22,234,471,342	(655,557,659)	(2.95)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	4,890,000	(4,890,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	463,471,393	463,471,393	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(463,471,393)	(468,361,393)	4,890,000	(1.04)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	21,579,198,083	22,234,863,342	(655,665,259)	(2.95)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,621,203,847	106,050	1,621,097,797	1,528,616.50
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,621,203,847	106,050	1,621,097,797	1,528,616.50
JUMLAH KEWAJIBAN	1,621,203,847	106,050	1,621,097,797	1,528,616.50
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,957,994,236	22,234,757,292	(2,276,763,056)	(10.24)
JUMLAH EKUITAS	19,957,994,236	22,234,757,292	(2,276,763,056)	(10.24)
JUMLAH EKUITAS	19,957,994,236	22,234,757,292	(2,276,763,056)	(10.24)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,579,198,083	22,234,863,342	(655,665,259)	(2.95)

Keterangan :
FINAL



DONGGALA, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

NURHADIYANTO, ST

PENATA Tk 1 / I/ld 197806282005021001